

BAB II

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Teori RBV (Resource Based View)

Ide dasar teori RBV adalah bahwa jika perusahaan menerima sumber daya yang berharga, memiliki keterampilan berharga yang tidak berwujud dan tidak dapat direproduksi, dan harus memiliki kemampuan bagi perusahaan untuk mengasimilasi dan menerapkan, maka keunggulan kinerja yang berkelanjutan ada, dan mencapai keunggulan kompetitif (Barney, 1991). Kehadiran teori RBV yang dicetuskan oleh Barney (1991), disebabkan oleh munculnya keraguan dari dua asumsi five force. Dua asumsi tersebut yaitu pertama, perusahaan yang berada dalam suatu kelompok strategis, yang dalam hal ini sumber daya perusahaan tersebut dapat dikontrol dengan strategi yang sama berlaku di perusahaan lain. Asumsi kedua, apabila sumber daya heterogenitas yang terdapat dalam suatu perusahaan atau organisasi berkembang, maka heterogenitas ini tidak akan bertahan lama. Hal ini dikarenakan sumber daya yang digunakan perusahaan tersebut mempunyai mobilitas yang tinggi. Artinya adalah perusahaan lain dapat dengan mudah memiliki sumber daya tersebut karena dapat diperjual belikan di pasar.

Sebuah perusahaan memiliki sumber daya yang berharga jika berhasil menerapkan strategi sumber daya yang digunakan dengan cara yang

menciptakan efektivitas dan efisiensi. Menyebarkan sumber daya yang berharga dapat membantu menemukan peluang dan menetralkan ancaman di sekitarnya, artinya pesaing tidak memiliki sumber daya yang sama dengan perusahaan lain dan tidak dapat menerapkan strategi yang sama. Perusahaan yang bersaing mungkin juga memiliki sumber daya yang berharga. Namun, itu juga membutuhkan sumber daya yang tidak dapat ditiru sepenuhnya oleh pesaing. Jika sebuah perusahaan memiliki sumber daya yang tidak dapat ditiru oleh pesaing, sumber daya tersebut akan berharga (Dasuki, 2021).

Mengacu pada teori RBV, perusahaan yang dimaksud pada penelitian ini adalah UMKM, akan terus unggul dalam persaingan apabila mereka memiliki strategi yang berbeda dengan para pesaingnya dan strategi tersebut sulit untuk ditiru. Jika pesaing-pesaing potensial gagal dalam meniru dan mengimplementasi strategi sumber daya tertentu, maka UMKM dapat dikatakan memiliki keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Selain itu, UMKM dapat mencapai keunggulan bersaing, jika perputaran sumber daya UMKM tersebut mempunyai pergerakan yang rendah. Pergerakan sumber daya yang rendah akan membuat sumber daya tersebut menjadi bernilai, tidak dapat ditiru, dan tidak dapat diganti, sehingga RBV dijadikan sebagai Grand Theory dalam penelitian ini, karena RBV mampu memberikan penjelasan mengenai literasi keuangan dan inklusi keuangan. Literasi keuangan dan inklusi keuangan dalam dunia usaha merupakan salah satu sumber daya internal perusahaan atau UMKM yang mempunyai value serta potensi dalam

menjalankan keberlangsungan usaha untuk mencapai suatu keunggulan bersaing.

2.2 Literasi Keuangan

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 2016 Nomor 76/POJK.07/2017 literasi keuangan adalah pengetahuan, keyakinan dan keterampilan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Literasi keuangan merupakan kemampuan bagi seseorang untuk membaca, menganalisis, mengelola dan mengkomunikasikan kondisi keuangan yang memengaruhi kesejahtraannya.

Menurut Hung et al. (2009), literasi keuangan mengacu pada sejauh mana seorang individu memahami konsep keuangan dan pengelolaan keuangan yang tepat serta mampu mengambil keputusan jangka pendek dan jangka panjang sesuai dengan dinamika kebutuhan dan kondisi ekonomi. Menurut Lusardi et al. (2008), literasi keuangan adalah kemampuan individu untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai perilaku keuangan yang lebih baik, dan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku menjadi entitas yang koheren dalam konsep literasi keuangan. Literasi keuangan merupakan suatu kesatuan dari sebuah intuisi, kemampuan, pengetahuan, sikap, serta tindakan yang dibutuhkan dalam mengambil keputusan terkait keuangan sehingga dicapai suatu kesejahteraan finansial seorang individu (OECD, 2016). Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan mendefinisikan literasi keuangan sebagai bentuk peningkatan kualitas

pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kekayaan dengan menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang diterapkan pada sikap dan perilaku individu. *The Association of Chartered Certified Accountants* menyebutkan bahwa komponen literasi keuangan meliputi wawasan konsep keuangan, pemahaman tentang bagaimana mengkomunikasikan konsep keuangan, kemampuan mengelola keuangan baik secara pribadi maupun dalam suatu organisasi, dan kemampuan untuk membuat keputusan keuangan dalam segala keadaan (Aribawa, 2016).

2.2.1. Tujuan Literasi Keuangan

Berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 76/POJK.07/2016 yang berisikan tentang peningkatan pada literasi keuangan dan inklusi keuangan yang ada di sektor jasa keuangan bagi konsumen maupun masyarakat, terdapat tujuan dari literasi keuangan yaitu:

1. Perubahan akan sikap dan perilaku individu pada pengelolaan keuangan guna menjadi lebih baik lagi, dengan hal ini mampu dalam menentukan serta dapat memanfaatkan lembaga, layanan jasa keuangan serta produk sesuai dengan yang dibutuhkannya serta kemampuan konsumen maupun masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.
2. Meningkatkan kualitas dalam pengambilan suatu keputusan individu dengan baik.

2.2.2 Manfaat Literasi Keuangan

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016), manfaat dari literasi keuangan antara lain:

1. Mampu memilih dan memanfaatkan produk dan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan serta memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik.
2. Terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas.
3. Mendapatkan pemahaman mengenai manfaat dan risiko produk dan layanan jasa keuangan.

Untuk lebih mengedukasi masyarakat agar semakin paham di bidang keuangan OJK merencanakan tiga pilar utama dalam program strategi nasional literasi. Pertama, mengedepankan program edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan. Kedua, berbentuk penguatan infrastruktur literasi keuangan dan ketiga, tentang pengembangan produk dan layanan jasa keuangan yang terjangkau.

2.2.3 Tingkat Literasi Keuangan

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016), pelaksanaan edukasi dalam rangka meningkatkan keuangan masyarakat sangat diperlukan karena berdasarkan survei yang dilakukan oleh OJK pada 2013, bahwa tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia dibagi menjadi empat bagian, yakni:

1. *Well literate*, yakni memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan

risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

2. *Sufficient literate*, memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.
3. *Less literate*, hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.
4. *Not literate*, tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

2.2.4 Dimensi Literasi Keuangan

Menurut Huston (2010), literasi keuangan memiliki dua dimensi yakni:

1. Dimensi pengetahuan

Dalam dimensi ini literasi keuangan sendiri berperan sebagai suatu kumpulan dalam pengetahuan tentang keuangan serta mengimplementasikannya melalui suatu bentuk keputusan keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam lingkup pengetahuan tentang finansial memiliki keterbatasan dalam pengetahuan individu mengenai bagaimana cara penggunaan produk keuangan yang dapat diperoleh melalui pendidikan maupun pengalaman pribadi.

2. Dimensi aplikasi

Dalam dimensi aplikasi literasi keuangan memiliki suatu kemampuan individu yang dilandasi dengan kepercayaan diri sendiri dalam menggunakan produk finansial dengan baik.

2.3 Inklusi Keuangan

2.3.1 Pengertian Inklusi Keuangan

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), inklusi keuangan adalah keadaan di mana semua anggota masyarakat memiliki akses ke berbagai layanan keuangan yang terjangkau, berkualitas, tepat waktu, lancar, aman, dan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing.

Inklusi keuangan merupakan salah satu topik perdebatan yang paling hangat, terutama dalam perkembangan global. Secara garis besar, inklusi keuangan dipandang sebagai alat kebijakan untuk mendorong pertumbuhan dan stabilitas dalam pengentasan kemiskinan sedangkan definisi inklusi keuangan menurut *Word Bank dan European Commision* yakni suatu bentuk kegiatan konsultasi yang bertujuan untuk menghilangkan semua hambatan harga dan non-harga terhadap akses publik untuk menggunakan jasa keuangan (Soederberg, 2013).

Inklusi keuangan dibutuhkan para pelaku UMKM untuk mendapatkan kemudahan dalam setiap proses bisnisnya. Salah satu faktor pendukung suatu bisnis adalah permodalan. Istiyana et al. (2017), menyebutkan bahwa permasalahan yang sering dihadapi oleh para pemangku kepentingan UMKM

terkait dengan permodalan dan proses pemasaran. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan mempermudah akses layanan keuangan. Kemudahan akses layanan lembaga keuangan akan memudahkan masyarakat awam dan pelaku bisnis untuk mendapatkan modal untuk menjalankan proses bisnisnya (Alimi, 2018). Inklusi keuangan adalah tersedianya akses keuangan terhadap layanan keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan bagi pelaku ekonomi adalah masih sulitnya berbisnis karena sulitnya akses layanan keuangan. Seperti yang dikatakan oleh Hilmawati dan Kusumaningtyas (2021), bahwa akses terhadap layanan keuangan, khususnya akses pinjaman, menjadi semakin sulit karena persyaratan untuk mengajukan pinjaman tidak terpenuhi. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mengatasi permasalahan permodalan tersebut adalah dengan penerapan keuangan inklusif (Yanti, 2019). Inklusi keuangan merupakan persyaratan bagi setiap orang untuk memiliki akses terhadap produk dan layanan keuangan (Gardeva dan Rhyne, 2011).

2.3.2 Manfaat Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan memiliki banyak manfaat. Menurut Bank (2018), peningkatan hanya 1% dalam inklusi keuangan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,03%. Belum lagi dampak yang lebih luas dari inklusi keuangan dalam bentuk penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan dan meminimalkan kesenjangan sosial. Selain itu, inklusi keuangan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih bagi negara, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan efisiensi ekonomi.
- 2) Mendukung stabilitas sistem keuangan.
- 3) Mengurangi shadow banking atau irresponsible finance.
- 4) Mendukung pendalaman pasar keuangan.
- 5) Memberikan potensi pasar baru bagi perbankan.
- 6) Mendukung peningkatan Human Development Index (HDI) Indonesia.
- 7) Berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang sustain dan berkelanjutan.
- 8) Mengurangi kesenjangan (*inequality*) dan *rigiditas low income trap*, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya berujung pada penurunan tingkat kemiskinan.

2.3.3 Tujuan Inklusi Keuangan

Berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 76/POJK.07/2016 yang berkaitan dengan inklusi keuangan. Dalam peraturan tersebut menatakan bahwa setidaknya terdapat empat dari tujuan inklusi keuangan. Dari tujuan-tujuan tersebut yakni sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan persediaan pada produk serta pada layanan jasa keuangan yang telah disediakan oleh produk dan layanan jasa keuangan (PUJK) yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan yang sesuai dengan masyarakat.
- b. Untuk meningkatkan adanya penggunaan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan apa kebutuhan masyarakat serta adanya kemampuan dari masyarakat

- c. Untuk meningkatkan akses pada masyarakat akan lembaga, produk dan layanan jasa keuangan
- d. Untuk meningkatkan kualitas pada pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan yang dimiliki masyarakat.

2.3.4 Dimensi Inklusi Keuangan

Dalam perkembangan pada inklusi keuangan bukan sebatas perkembangan pada produk dan juga jasa keuangan saja melainkan mencakup beberapa elemen yang berperan penting maka dalam pembahasan keuangan inklusif sendiri terdapat beberapa indikator atau disebut juga dengan elemen-elemen memiliki peran penting yang perlu diperhatikan, yakni:

- a. Dimensi akses

Dalam dimensi ini terdapat beberapa faktor yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam penggunaan jasa keuangan dengan hal ini dapat dilihat bagaimana potensi akan hal-hal yang akan menjadi hambatan dalam membuka serta menggunakan rekening bank, dengan contoh seperti bentuk fisik dalam layanan jasa keuangan (ATM, kantor, bank, dll).

- b. Dimensi penggunaan

Dalam dimensi penggunaan ini memiliki faktor yang digunakan untuk mengukur suatu penggunaan dalam jasa keuangan dan produk. Misalnya seperti frekuensi, lama penggunaan serta keteraturan. Dalam pengguna produk dan jasa keuangan merupakan salah satu tujuan akhir karena

terdapat suatu harapan yang diminta oleh pihak pemberi yakni suatu kesejahteraan masyarakat secara adil.

c. Dimensi kualitas

Dalam dimensi ini memiliki faktor yang dapat digunakan untuk mengetahui suatu ketersediaanya produk serta jasa keuangan apakah hal tersebut telah memenuhi kebutuhan pelanggan. Dengan kualitas pada produk dan layanan jasa keuangan yang baik maka dengan hal ini ketika suatu layanan tersebut digunakan masyarakat dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan keinginannya.

d. Dimensi kesejahteraan

Dalam dimensi ini memiliki faktor yang dapat digunakan untuk mengukur suatu dampak layanan keuangan terhadap tingkat kehidupan yang bersangkutan dalam penggunaan jasa. Dengan adanya ketersediannya pada produk dan layanan jasa keuangan yang dibutuhkan bagi seluruh golongan masyarakat yang dituju maka dengan hal itu setiap golongan dapat memanfaatkan produk dan juga layanan jasa keuangan yang baik.

2.3.5 Strategi Nasional Inklusi Keuangan

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif atau lebih dikenal SNKI 2016 membagi strategi inklusi keuangan menjadi 5 pilar utama yaitu :

1. Edukasi keuangan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan produk dan jasa keuangan di pasar keuangan formal. Edukasi keuangan ini mencakup pengetahuan dan

kesadaran akan keragaman layanan dan produk keuangan, pengetahuan dan kesadaran akan risiko produk keuangan, perlindungan nasabah, dan keterampilan dalam menangani keuangan.

2. Hak properti masyarakat, banyaknya masyarakat yang tidak dapat melakukan pinjaman dilembaga keuangan formal karena pinjaman formal pada umumnya mengharuskan memberikan jaminan berupa asset yang dimiliki. Hak properti masyarakat bertujuan dalam meningkatkan akses kredit dari masyarakat kepada lembaga keuangan formal.
3. Fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan, infrastruktur yang kurang merata di Indonesia sering kali menjadi hambatan masuknya masyarakat dalam lembaga keuangan formal. Fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan bertujuan untuk memperluas jangkauan terhadap jangkauan layanan keuangan guna memenuhi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat.
4. Layanan keuangan pada sektor pemerintah, pada pilar ini bertujuan dalam meningkatkan tata kelola dan transparansi pelayanan publik dalam penyaluran dana pemerintah secara non tunai. Penyaluran nontunai merupakan upaya dalam mempercepat pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan keuangan dan keterkaitan masyarakat dengan perbankan.
5. Perlindungan konsumen, pilar terakhir ini bertujuan untuk memberikan rasa aman pada masyarakat dalam berinteraksi dengan

lembaga keuangan, serta mempunyai prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan, dan keamanan data/informasi konsumen, penanganan pengaduan, serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

2.4 Kinerja UMKM

2.4.1 Pengertian Kinerja UMKM

Mangkunegara (2011), menyatakan bahwa kinerja adalah hasil kualitas dan kuantitas pekerjaan yang dicapai oleh seorang pegawai yang melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada pegawai tersebut. Kinerja adalah hasil dan fungsi kerja dan aktivitas individu atau kelompok dalam suatu organisasi, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, untuk mencapai tujuan bersama dalam jangka waktu tertentu, dan dalam suatu kelompok sebagai hasil tanggung jawab bersama (Tika, 2012).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan cabang dari perkembangan industri kreatif dalam perekonomian setiap negara. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pengertian UMKM dijelaskan pada masing-masing jenis usaha, diantaranya :

1. Usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria;
2. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria;

3. Usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan;
4. Usaha besar merupakan usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 pasal 3 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). UMKM bertujuan untuk mengembangkan dan memperluas usaha yang dijalankannya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Secara konseptual, sebuah UMKM dapat diberdayakan dengan sistem pemberdayaan pelaku UMKM. Keberhasilan pemberdayaan sangat bergantung pada peran serta UMKM sebagai pelaku dan pemangku kepentingan lainnya yang ikut serta berperan dalam pembangunannya.

Menurut Aribawa (2016), menyatakan bahwa kinerja UMKM merupakan salah satu hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang dan dapat diselesaikan dengan tugas individu tersebut didalam perusahaan dan pada suatu periode tertentu dan akan dihubungkan dengan ukuran nilai atau standard dari perusahaan yang individu bekerja.

Kriteria UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, kriteria UMKM sebagai berikut :

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

2.4.2 Karakteristik UMKM

Karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi faktual yang melekat pada aktivitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. Karakteristik ini yang menjadi ciri pembeda antar pelaku usaha sesuai dengan skala usahanya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu:

- 1) Usaha Mikro (jumlah karyawan 10 orang);
- 2) Usaha Kecil (jumlah karyawan 30 orang); dan
- 3) Usaha Menengah (jumlah karyawan hingga 300 orang).

Dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam empat kelompok, yaitu:

- 1) UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima.

2) UMKM Mikro adalah para UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya.

3) Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan sub kontrak) dan ekspor.

4) *Fast Moving Enterprise* adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.

2.4.3 Indikator Kinerja UMKM

Terdapat beberapa indikator dari kinerja UMKM sendiri:

a) **Pertumbuhan Usaha**

Dimana dalam pertumbuhan usaha memiliki suatu kemampuan dalam usaha yang dapat meningkatkan kapasitas penjualan serta melakukan suatu diversifikasi dalam lini produk. Aribawa (2016), mengemukakan bahwa pertumbuhan suatu usaha dibuktikan dengan peningkatan penjualan perusahaan secara berkala. Kinerja penjualan yang lebih tinggi atau lebih baik menghasilkan lebih banyak keuntungan.

b) **Total Pendapatan Usaha**

Dalam total pendapatan usaha berasal dari suatu kegiatan utama dari perusahaan. Dari seluruh pendapatan yang berasal dari selisih antara penerima dengan total biaya dalam kurun waktu tertentu. Pendapatan sendiri dapat didefinisikan menjadi dua, yaitu pendapatan operasional, dimana pendapatan operasional sendiri hasil dari penjualan produk atau

jasa menjadi salah satu kegiatan utama dalam suatu usaha dan pendapatan non operasional, dimana dari pendapatan non operasional sendiri suatu pendapatan yang berasal dari luar kegiatan utama dalam perusahaan yang memiliki sifat isidentil atau dapat dikatakan pendapatan dari hasil penjualan surat berharga, bunga, sewa, royalti, maupun penjualan aktiva tak berwujud.

c) Total Order

Dalam total order ini dapat diartikan bahwa seluruh total pesanan produk yang telah dipesan atau yang akan dibeli oleh konsumen. Aribawa (2016), berpendapat bahwa order adalah proses pembelian yang dilakukan oleh Pembeli secara langsung atau tidak langsung kepada penjual.

d) Posisi Kas Usaha

Dimana dalam posisi kas usaha dilakukan pencatatan keuangan usaha untuk mengetahui seberapa besar keuntungannya yang didapatkannya selama menjalankan suatu usaha dan juga untuk mengetahui arus kas masuk maupun arus keluar.

2.4 Kajian Empiris

Tabel 2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

NO	Nama, Judul Penelitian, Tahun	Variabel dan Indikator	Metode/Analisis data	Hasil Penelitian
1	Safira Nindy	Variabel	metode	Hasil penelitian

<p>Febriana & Muhammad Sulhan, Pengaruh Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM Pada Masa Pandemi COVID 19 Di Kabupaten Malang</p>	<p>independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inklusi keuangan • Literasi keuangan <p>Variabel</p> <p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja UMKM 	<p>Probability Sampling dengan menggunakan media penyebaran kuesioner dan dibantu dengan software PLS</p>	<p>menunjukkan Inklusi keuangan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja UMKM pada masa pandemic Covid-19 di Kabupaten Malang. Literasi keuangan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja UMKM pada masa pandemic Covid-19 di Kabupaten Malang.</p>
---	--	---	---

2	Wira Iko Putri Yanti, Pengaruh Inklusi Keuangan Dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM Di Kecamatan Moyo Utara, 2019	<p>Variabel independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inklusi keuangan • Literasi keuangan <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja UMKM 	Teknik pengambilan sampel menggunakan probability sampling dan sampling jenuh. Analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda.	Hasil penelitian menunjukkan Inklusi keuangan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Literasi keuangan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM.
3	Rahma Eka Putri , Goso , dan Rahmad	<p>Variabel independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inklusi keuangan 	Data yang digunakan adalah data primer yang	Literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja

	<p>Solling Hamid , Imran Ukkas, Pengaruh Literasi Keuangan, Financial Technolog y Dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pengusaha Muda. 2022</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Financial Technology • Literasi keuangan <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Keuangan 	<p>diperoleh dari kuisisioner. Hipotesis yang digunakan adalah regresi berganda dengan bantuan SPSS.</p>	<p>keuangan pengusaha muda di kabupaten luwu utara. Financial Technology berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pengusaha muda di kabupaten luwu utara. Inklusi keuangan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pengusaha muda di luwu utara.</p>
4	Poppy	Variabel	Penelitian ini	Hasil penelitian

	Alvianolit a Sanistasya , Kusdi Rahardjo , dan Mohamma d Iqbal, Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja Usaha Kecil di Kalimanta n Timur, 2019	independen: <ul style="list-style-type: none"> • Inklusi keuangan • Literasi keuangan Variabel Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Usaha 	bersifat kuantitatif dan menggunakan alat analisis PLS (Partial Least Square).	menemukan terdapat pengaruh positif dan signifikan literasi keuangan terhadap kinerja usaha kecil di Provinsi Kalimantan Timur, terdapat pengaruh positif dan signifikan inklusi keuangan terhadap kinerja usaha kecil di Provinsi Kalimantan Timur
5	Aminul Fajri,	Variabel independen:	penelitian ini diolah dengan	1. Hasil pengujian dalam penelitian

	Dewi Indriasih, dan Nur Indriyati, Pengaruh Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan terhadap Kinerja UMKM Batik di Kabupaten Tegal, 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Inklusi keuangan • Literasi keuangan <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja UMKM 	menggunakan uji regresi linier berganda dengan alat bantu program SPSS versi 22.	ini menunjukkan bahwa inklusi keuangan mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja UMKM Batik. 2. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa literasi keuangan mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja UMKM Batik.
6	Risa Nadya Septiani, Eni Wuryani, Pengaruh	Variabel independen:	Teknik pengambilan sampel yaitu simple random sampling. Teknik analisis	Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat literasi keuangan maka semakin

	Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja Ukm Di Sidoarjo, 2020	keuangan Variabel Dependen: • Kinerja UMKM	data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS komputer.	tinggi pula perkembangan kinerja UMKM di wilayah Sidoarjo dan inklusi keuangan terbukti menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja UMKM di Sidoarjo.
7	Joko Susilo, Yuneita Anisma, dan Azhari Syofyan, Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan,	Variabel independen: • Inklusi keuangan • Literasi keuangan • Inovasi Variabel Dependen: • Kinerja	Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda sedangkan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah	Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh variabel literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota

	Dan Inovasi Terhadap Kinerja UMKM, 2022	UMKM	software SPSS	Pekanbaru sedangkan inovasi tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja Usaha Micro Kecil dan Menengah di Kota Pekanbaru.
8	Mei Ruli Ninin Hilmawati dan Rohmawati Kusumani ngdias, Inklusi Keuangan Dan Literasi Keuangan	<p>Variabel independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inklusi keuangan • Literasi keuangan <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja usaha • Keberlangsungan 	Analisis dilakukan dengan pendekatan Partial Least Square	Penelitian ini menyimpulkan bahwa inklusi keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja dan keberlangsungan UMKM di Kota Surabaya sedangkan Literasi keuangan memiliki

	Terhadap Kinerja Dan Keberlangsungan Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah, 2021	usaha		pengaruh terhadap kinerja dan keberlangsungan UMKM di Kota Surabaya.
9	Bulama Garba Dandibi, Dr. Wurim, Ben Pam, dan Dr. Oki Emmanuel Umaru, Effect of Financial	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Financial Inclusion • Financial Literacy <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SMEs Performance 	Kuesioner digunakan untuk pengumpulan data sementara hierarkis regresi diadopsi sebagai teknik analisis data	Hasilnya mengungkapkan bahwa ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan, dan kegunaan layanan keuangan semuanya memiliki berpengaruh

	<p>Inclusion And Financial Literacy On Performan ce Of Agro- Based SMEs In Yobe State, Nigeria, 2019</p>			<p>signifikan terhadap kinerja UKM berbasis agrowisata di Yobe State. Juga, literasi keuangan sepenuhnya memediasi hubungan antara ketersediaan layanan keuangan dan kinerja UKM berbasis agro di Yobe State sementara sebagian memediasi hubungan antara aksesibilitas dan keterjangkauan layanan dan</p>
--	--	--	--	--

				kinerja keuangan.
10	Bassey Ina Ibor, Amenawo Ikpa Offiong, Enyeokpo n Samuel Mendie. Financial Inclusion And Performan ce Of Micro, Small And Medium Scale Enterprise s In	Variabel Independen: • Financial Inclusion Variabel Dependen: • Performanc e Of Micro, Small And Medium Scale Enterprises	Metode desain penelitian survei menggunakan kuesioner dan menganalisis data menggunakan teknik Pearson Chi-square.	Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara inklusi keuangan dengan pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah skala perusahaan di Nigeria. Kebijakan inklusi keuangan tersebut berdampak signifikan dan positif terhadap operasional usaha mikro, kecil dan menengah.

	Nigeria, 2017			Namun, jarak ke keuangan titik akses layanan keuangan dan kekurangan infrastruktur dapat menantang seberapa cepat dan secara efektif usaha mikro, kecil dan menengah akan mengakses layanan keuangan di Nigeria.
--	------------------	--	--	---

2.6 Hipotesis

Berdasarkan kajian teori penelitian diatas yang relevan maka peneliti mengajukan 2 hipotesis yaitu:

1. Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM

Menurut Aribawa (2016), peningkatan kinerja memerlukan cara-cara strategis, salah satunya literasi keuangan. Literasi keuangan mencakup pengetahuan, keyakinan, dan keterampilan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas

pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam konteks kesejahteraan. Apabila dikaitkan dengan teori RBV, literasi keuangan mampu memengaruhi kinerja suatu UMKM karena teori RBV menjelaskan bahwa literasi keuangan adalah sumber daya internal perusahaan (UMKM) yang mempunyai potensi serta *value* dalam mendukung keberlangsungan UMKM, agar mampu *survive* diberbagai situasi atau kondisi. Pelaku UMKM harus mempunyai pengetahuan keuangan yang baik agar memudahkan dalam mengelola keuangan. Keuangan yang dikelola dengan baik akan mampu meningkatkan keberlangsungan UMKM menjadi lebih baik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yanti (2019), literasi keuangan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM.

H1: Literasi Keuangan Berpengaruh Positif terhadap Kinerja UMKM.

2. Pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Kinerja UMKM

Inklusi keuangan adalah persyaratan bagi setiap orang untuk memiliki akses ke produk dan layanan keuangan (Gardeva dan Rhyne, 2011). Apabila dikaitkan dengan grand theory RBV, inklusi keuangan termasuk pada sumber daya yang bernilai dan berpotensi karena apabila pelaku UMKM mampu menerapkan literasi keuangan dengan baik maka pelaku UMKM tersebut akan memiliki pemahaman terhadap inklusi yang disediakan oleh pihak ketiga, yaitu bank maupun non bank. Dengan demikian, akan menghasilkan keefektifan dan keefisienan pada UMKM tersebut. Penerapan sumber daya yang bernilai dan

memiliki potensi, membuat UMKM mampu melihat peluang-peluang dan menetralkan ancaman-ancaman yang ada di sekitarnya.

Berdasarkan hasil penelitian Yanti (2019), inklusi keuangan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja UMKM akan meningkat secara signifikan apabila pelaku UMKM terus meningkatkan inklusi keuangan.

H2: Inklusi Keuangan Berpengaruh Positif terhadap Kinerja UMKM.

2.7 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2017:60), mengemukakan bahwa kerangka kerja adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah utama. Kerangka kerja yang baik akan merasionalisasikan hubungan antar variabel yang diteliti. Secara teoritis, hubungan antara variabel independen dan dependen harus dijelaskan.

Gambar 2.1 kerangka pemikiran

